



RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SEMARANG



Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang
Jl. Ronggolawe No. 10 Telp. Semarang (024) 7604689

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa yang melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Rencana Kerja (Renja) SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang Tahun 2022 ini dapat tersusun.

Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Penyusunan Renja SKPD ini sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026 serta Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang dan merupakan penjabaran rincian mengenai program, kegiatan, sub kegiatan yang terdiri dari sasaran dan capaian sesuai prioritas yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan / sub kegiatan yang disusun oleh masing – masing SKPD termasuk Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang Tahun 2022 disusun dan diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

DAFTAR ISI

Halaman Judul i

Kata Pengantar ii

Daftar Isi iii

Bab I Pendahuluan I-1

 1.1 Latar Belakang I-1

 1.2 Landasan Hukum I-4

 1.3 Maksud dan Tujuan I-5

 1.4 Sistematika Penulisan I-5

Bab II Hasil Evaluasi Renja Satpol PP Kota Semarang

Tahun Lalu II-6

 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Satpol PP Kota Semarang
 Tahun Lalu dan Capaian Renstra Satpol PP
 Kota Semarang II-7

 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Satpol PP Kota Semarang II-18

 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
 Satpol PP Kota Semarang II-21

 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD II-24

 2.5 Penelaahan II-35

Bab III Tujuan dan Sasaran Satpol PP Kota Semarang III-36

 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional III-36

 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Satpol PP Kota Semarang III-41

Bab IV Penutup IV-48

 2.1 Catatan Penting IV-48

 2.2 Kaidah-kaidah pelaksanaan IV-48

 2.3 Rencana Tindak Lanjut IV-49

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan kepada setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Dalam Proses Pelaksanaan kegiatan sebuah Satuan Kerja Perangkat Daerah dibutuhkan sebuah rencana yang akan menjadi acuan dari pelaksanaan kinerja yang diharapkan menjadi sebuah pola rencana kerja yang akuntabel dan teratur.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, yang kemudian dilakukan penyempurnaan terhadap mekanisme penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga sehingga menjadi lebih transparan dan akuntabel. Maka berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu mengganti Peraturan Pemerintah 21 Tahun 2004 menjadi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2010 tentang tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 12 ayat (1) yang berbunyi urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar antara lain penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, maka kedudukan Satpol PP pada mata rantai penyelenggaraan roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat semakin jelas dan terarah.

Dalam menjalankan amanat tersebut, maka Satpol PP Kota Semarang sebagai perangkat daerah mewajibkan untuk menyusun Renja Satpol PP Kota Semarang, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD dengan memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD.

Sesuai visi pembangunan daerah sebagaimana RPJMD 2021-2026 yaitu: **"Terwujudnya Kota Semarang yang Semakin Hebat berlandaskan Pancasila dalam Bingkai NKRI yang Ber-Bhineka Tunggal Ika"**. Visi tersebut bermakna bahwa Kota Semarang yang hebat akan menjadi semakin hebat kedepannya. Terbukti bahwa Kota Semarang sebagai Kota Metropolitan telah dapat menyelesaikan isu-isu strategis kota pada lima tahun terakhir, antara lain meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi, meningkatkan kontribusi kategori-kategori yang terkait dengan perdagangan dan jasa serta industri terhadap PDRB, meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG), meningkatkan nilai investasi, menurunkan angka kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Terbuka, mengatasi masalah rob dan banjir, serta meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi.

Tataran semakin hebat dapat dimaknai bahwa dalam lima tahun ke depan, Kota Semarang akan siap menghadapi tantangan global, problematika perkotaan yang lebih heterogen, tuntutan layanan publik yang lebih tinggi serta tetap memperhatikan wawasan lingkungan. Untuk mencapai Kota yang semakin hebat tersebut, Pemerintah Kota Semarang bersama masyarakat akan bahu-membahu membangun kota dengan berlandaskan Pancasila dalam bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika. Sehingga, Kota Semarang menjadi daerah yang kondusif dan dapat mendukung pengembangan ekonomi, sosial dan budaya di masyarakat yang akhirnya dapat mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya.

SEMAKIN HEBAT, mengandung arti bahwa Kota Semarang melalui semangat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan pembangunan kota akan menguatkan berbagai keunggulan sebagai sebuah kota metropolitan yang memiliki sumber daya manusia yang unggul, ekonomi berbasis kerakyatan yang berdaya saing berbasis riset dan inovasi, berkeadilan sosial, infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan, serta pelayanan publik yang dinamis untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mewujudkan visi tersebut dirumuskan 5 (lima) misi pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Produktif untuk Mencapai Kesejahteraan dan Keadilan Sosial.
2. Meningkatkan Potensi Ekonomi Lokal yang Berdaya Saing dan Stimulasi Pembangunan Industri, Berlandaskan Riset dan Inovasi Berdasar Prinsip Demokrasi Ekonomi Pancasila.

3. Menjamin Kemerdekaan Masyarakat Menjalankan Ibadah, Pemenuhan Hak Dasar dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial serta Hak Asasi Manusia bagi Masyarakat Secara Berkeadilan.
4. Mewujudkan Infrastruktur Berkualitas yang Berwawasan Lingkungan untuk Mendukung Kemajuan Kota.
5. Menjalankan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Secara Dinamis dan Menyusun Produk Hukum yang Sesuai Nilai-Nilai Pancasila dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari visi dan misi yang telah ditetapkan, Satpol PP Kota Semarang sebagai penyelenggara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Kota Semarang melaksanakan misi 3 yaitu Menjamin Kemerdekaan Masyarakat Menjalankan Ibadah, Pemenuhan Hak Dasar dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial serta Hak Asasi Manusia bagi Masyarakat Secara Berkeadilan. Dari Misi tersebut ditetapkan tujuan adalah Meningkatnya pemenuhan hak dasar, kesetaraan gender, dan kondusivitas wilayah bagi masyarakat secara berkeadilan dengan indikatornya Persentase Penurunan Gangguan Keamanan dan Ketertiban. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang harus dapat diwujudkan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya internalisasi ideologi Pancasila serta wawasan kebangsaan;
2. Meningkatnya akses dan perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender;
3. Meningkatnya kualitas ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Arah kebijakan tersebut selaras dengan tujuan RPJPD :

1. Penguatan upaya perlindungan masyarakat untuk menjaga dan memelihara keamanan, ketertiban, persatuan dan kesatuan serta kerukunan masyarakat dalam rangka mewujudkan terjaminnya keamanan dan ketertiban umum dan tegaknya hukum serta terselenggaranya perlindungan dan pengayoman terhadap masyarakat yang didukung oleh sarana dan prasarana keamanan dan ketertiban yang memadai;
2. Penguatan dan sinkronisasi, harmonisasi produk-produk hukum pusat dan daerah sesuai dengan rasa keadilan dan dinamika masyarakat serta pengembangan kesadaran masyarakat dan aparat penegak hukum dalam rangka meningkatkan kapasitas hukum dan HAM.

Sedangkan isu strategis terkait pelaksanaan tugas Satpol PP berdasarkan RPJMD 2021-2026 pada misi 3 adalah belum optimalnya konsistensi dan komitmen aparatur dalam penegakan perda dan perkara.

Untuk melaksanakan Misi 3 yaitu Menjamin Kemerdekaan Masyarakat Menjalankan Ibadah, Pemenuhan Hak Dasar dan Perlindungan

Kesejahteraan Sosial serta Hak Asasi Manusia bagi Masyarakat Secara Berkeadilan. Dari Misi tersebut ditetapkan tujuan adalah Meningkatnya pemenuhan hak dasar, kesetaraan gender, dan kondusivitas wilayah bagi masyarakat secara berkeadilan, maka ditetapkan strategi yaitu peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga ketertiban dan kenyamanan. Adapun arah kebijakannya adalah :

1. Peningkatan masyarakat yang tertib dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan
2. Peningkatan ketentraman dan kenyamanan melalui pemberdayaan masyarakat.

dan dituangkan dalam program :

1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Dengan program prioritas RPJMD pada : Pengendalian dan Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Renja Satpol PP Kota Semarang Tahun 2021 ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang Tata cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Peraturan Presiden republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standart Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata cara penyusunan perencanaan pembangunan daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Renja Daerah Kota Semarang;
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Semarang;
13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026;
14. Peraturan Walikota Semarang Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) adalah untuk menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang strategis selama satu tahun melalui sumber pembiayaan APBD, yang dilengkapi dengan indikator kinerja, yaitu masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) dimaksudkan untuk memberikan landasan kebijakan teknis strategis selama satu tahun dalam kerangka pencapaian visi dan misi sebagai tolok ukur pertanggungjawaban Kepala Satuan pada akhir tahun Anggaran.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mempermudah dalam pemahaman materi, maka Rencana Kerja (Kerja) Satuan Polisi Pamong Praja ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Hasil Evaluasi Renja Satpol PP Kota Semarang Tahun Lalu

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Satpol PP Kota Semarang

- Tahun Lalu dan Capaian Renstra Satpol PP Kota Semarang
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Satpol PP Kota Semarang
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satpol PP Kota Semarang
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan

Bab III Tujuan dan Sasaran Satpol PP Kota Semarang

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Satpol PP Kota Semarang

Bab IV Penutup

- 2.1 Catatan Penting
- 2.2 Kaidah-kaidah pelaksanaan
- 2.3 Rencana Tindak Lanjut

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SEMARANG TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang

Pada Tahun 2020, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang telah melaksanakan 9 Program, 46 kegiatan dengan rincian anggaran sebagai berikut :

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SEMARANG	ANGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PERSEN TASE (%)
Belanja Tidak Langsung	19.987.255.580	18.788.063.402	94 %
Belanja Langsung	17.123.061.000	16.987.026.352	99,21%
JUMLAH	37.110.316.580	35.775.089.754	96,4 %

Adapun capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang pada tahun 2020 dapat kami sampaikan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Didalam program ini terdapat 11 kegiatan yang dikelola oleh sekretariat. Dengan total anggaran Rp. 5.299.577.700,- dapat terealisasi sebesar Rp. 5.231.008.227,- atau persentase realisasi anggarannya 98,71%. Hasil kinerja pada tahun 2020 adalah cakupan pelayanan administrasi perkantoran dimana capaiannya 100%. Hasil kinerja sasaran ini dapat dilihat dari terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang yang ditargetkan 100% dari 11 kegiatan bisa terlaksana semua.

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu :

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik;
- b. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
- c. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
- d. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan;
- e. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- f. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
- g. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan;

- h. Penyediaan Makanan Dan Minuman;
- i. Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah;
- j. Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah;
- k. Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran.

2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Program ini terdapat 7 kegiatan yang dikelola oleh sekretariat. Total anggaran Rp. 1.004.248.300,- dapat terealisasi sebesar Rp. 1.001.608.107,- atau persentase realisasi anggarannya 99,74%. Hasil kinerja pada tahun 2020 adalah terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur yang dibutuhkan, dimana capaiannya 100%. Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu :

- a. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
- b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
- c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional;
- d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor;
- e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor;
- f. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional;
- g. Pengelolaan Web Site.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program ini hanya terdapat 1 kegiatan yang dikelola oleh sekretariat. Total anggaran Rp. 256.297.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 256.296.920,- atau persentase realisasi anggarannya 100%. Hasil kinerja pada tahun 2020 adalah terpenuhinya pakaian dinas yang dibutuhkan, dimana capaiannya 100%. Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai karena kegiatan telah dilaksanakan yaitu : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini terdapat 2 kegiatan dimana 1 kegiatan terkena refocusing, sehingga hanya 1 kegiatan yang dijalankan. Total anggaran Rp. 31.020.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 31.020.000,- atau persentase realisasi anggarannya 100%. Hasil kinerja pada tahun 2020 adalah terlaksananya pembinaan fisik bagi SDM Satuan Polisi Pamong

Praja, dimana capaiannya 100%. Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai karena kegiatan telah dilaksanakan yaitu : Pembinaan fisik pegawai dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Program ini terdapat 8 kegiatan dengan Total anggaran Rp. 117.086.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 116.816.000,- atau persentase realisasi anggarannya 99,77%. Hasil kinerja pada tahun 2020 adalah terlaksananya penyusunan pelaporan capaian kinerja dan keuangan Satuan Polisi Pamong Praja, dimana capaiannya 100%. Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu :

- a. Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan Pembantu;
- b. Penyusunan Lkpj Skpd;
- c. Penyusunan Lakip;
- d. Penyusunan Laporan Renja (Rencana Kerja);
- e. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun;
- f. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran;
- g. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran.

6. Program Pengendalian Dan Penanganan Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Program ini terdapat 7 kegiatan dengan total anggaran Rp. 6.354.196.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 6.310.556.748,- atau persentase realisasi anggarannya 99,31%. Hasil kinerja sasaran ini dapat dilihat dari persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditargetkan sebanyak 44,88% yang tercapai 44,88%. Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu :

- a. Pengawasan Pelanggaran Perda Dan Trantibum;
- b. Peningkatan Kewaspadaan Masyarakat Terhadap Gangguan Trantibmas;
- c. Gelar Pasukan Ketentraman Dan Ketertiban Umum;
- d. Pengendalian Data Dan Informasi Tibum, Tranmas, Penegakan Perda Dan Linmas;
- e. Penyusunan Sop Tribum, Tranmas, Penegakan Perda Dan Linmas;

- f. Pengamanan Dan Pengendalian Trantibum;
- g. Pengamanan Obyek Vital Dan Kegiatan Penting Pemerintah.

7. Program Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah

Program ini terdapat 7 kegiatan dengan total anggaran Rp. 356.797.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 345.494.950,- atau persentase realisasi anggarannya 96,83%. Hasil kinerja yang dicapai pada tahun 2020 adalah Jumlah Peraturan Perundang-undangan Daerah yang ditegakkan bertambah sebanyak 1 (satu) perda dibandingkan tahun 2019 sehingga menjadi sebanyak 30 perda yang ditargetkan dan tercapai 100%. Pelaksanaan penegakan peraturan dilaksanakan dalam bentuk non yustisi dan yustisi dengan penerapan sanksi administrasi ataupun pidana. Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu :

- a. Penertiban Dan Penindakan;
- b. Koordinasi Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Penegakan Perda;
- c. Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap Peraturan Daerah;
- d. Penyelidikan, Penyidikan Dan Persidangan Pelanggaran Perda;
- e. Pembinaan Ppns Daerah;
- f. Pengelolaan Pengaduan Dan Gangguan Ketentraman Ketertiban Masyarakat;
- g. Peningkatan Kewaspadaan Dini.

8. Program Pengembangan Potensi Dan Pemberdayaan Satlinmas

Program ini terdapat 2 kegiatan dengan total anggaran Rp. 135.849.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 134.249.000,- atau persentase realisasi anggarannya 98,82%. Hasil kinerja yang dicapai pada tahun 2020 adalah Jumlah Linmas yang difasilitasi dan diberdayakan sebanyak 4.974 orang dari yang ditargetkan sebanyak 4.242 orang Linmas yang berarti melampaui target dengan selisih sebanyak 732 orang. Jumlah tersebut dihitung dari jumlah Linmas yang sudah diberdayakan dan difasilitasi dalam bentuk pemberian pakaian, pengerahan, pelatihan dan pembinaan diakumulasi setiap tahunnya. Jumlah target tersebut bertambah sebanyak 753 orang dibandingkan tahun 2019. Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu :

- a. Pengerahan Dan Peningkatan Kewaspadaan Linmas Terhadap Gangguan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan;

- b. Fasilitasi dan Pembinaan dan Peningkatan SDM Linmas.

9. Program Peningkatan Ketertiban dan Ketentraman Lingkungan

Program ini terdapat 2 kegiatan dengan total anggaran Rp. 3.567.990.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 3.559.976.400,- atau persentase realisasi anggarannya 99,79%. Hasil kinerja pada tahun 2020 adalah 0,83 dengan perhitungan target sejumlah 8.767 dibandingkan 9529 (Linmas sejumlah RT). Sedangkan realisasinya hanya mencapai 0,83 yaitu sejumlah 7.930 orang. Angka tersebut tidak memenuhi target. Hal tersebut dikarenakan banyak petugas yang pensiun/meninggal dunia. Indikator Kinerja tersebut didukung oleh kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu :

- a. Data Base dan Aplikasi Linmas;
- b. Monitoring dan Evaluasi Administrasi Sistem Keamanan Lingkungan.

Secara lebih jelas, rekapitulasi evaluasi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel T-C.29.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021
Kota Semarang

Nama Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang

Lembar : 1

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)/ kegiatan (<i>ouput</i>)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.1.05	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat									
1.1.05.05	Satuan Polisi Pamong Praja									
1.1.05.05.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya listrik air dan internet kantor	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terwujudnya lingkungan perkantoran yang bersih	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
010	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
012	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat listrik dan penerangan kantor	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)/ kegiatan (<i>ouput</i>)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
014	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
017	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minum rapat serta jamuan penerimaan tamu/kunjungan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya konsultasi kunjungan kerja dan pemenuhan undangan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
028	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya konsultasi, kunjungan kerja dan pemenuhan undangan di dalam daerah	100 %	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
154	Belanja jasa Penunjang Administrasi Perkantoran	Tersedianya penunjang administrasi perkantoran	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1.1.05.05.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
005	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Presentase kendaraan dinas yang diadakan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Presentase perlengkapan kantor yang diadakan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Persentase peralatan gedung kantor yang diadakan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
022	Pemeliharaan rutin/ berkala Gedung Kantor	Prosentase Gedung Kantor yang dipelihara	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
024	Pemeliharaan rutin / berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Prosentase kendaraan dinas yang dipelihara	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)/ kegiatan (<i>ouput</i>)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
026	Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor	Prosentase perlegkapan gedung kantor yang dipelihara	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
028	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	Prosentase peralatan gedung kantor yang dipelihara	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
096	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional	Prosentase Pengurusan perijinan Kendaraan Dinas/operasional	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
139	Pengelolaan website	Prosentase pengelolaan website	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1.05 1.1.05.01 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Disiplin Aparatur	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
002	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Persentase anggota yang diberi pakaian dinas dan perlengkapannya	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1.05 1.1.05.01 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
012	Pembinaan Fisik Pegawai	Persentase peserta yang lulus pembinaan fisik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
014	Peningkatan Kualitas SDM	Persentase peserta yang lulus pendidikan/pelatihan/bi mtek	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1.05 1.1.05.01 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tertib Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
005	Penunjang kinerja PA, PPK, bendahara dan pembantu	Persentase pengelolaan keuangan dan administrasi kerja	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
006	Penyusunan LKPJ SKPD	Jumlah dokumen LKPJ yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)/ kegiatan (<i>ouput</i>)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
010	Penyusunan LAKIP	Jumlah dokumen LAKIP/LkjiP yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
017	Penyusunan laporan Renja (rencana kerja)	Jumlah dokumen Renja yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
020	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
022	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah dokumen Laporan Semesteran yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
023	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah dokumen Laporan Prognosis yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
034	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Jumlah dokumen RKA/DPA Murni/Perubahan yang disusun	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %
1.05 1.1.05.01 18	Program Pengendalian dan Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Cakupan penanganan gangguan trantibum	95	92	93	93	100 %	94	94	100 %
001	Pengawasan pelanggaran perda dan trantibum	Jumlah patroli siaga ketertiban dan ketentraman masyarakat di jalan protokol dan objek wisata	10.080 Kegiatan	5.760 kegiatan	7200 Kegiatan	7200 kegiatan	100%	8640 Kegiatan	8640 Kegiatan	100 %
004	Peningkatan kewaspadaan masyarakat terhadap gangguan trantibmas	Persentase gangguan ketertiban kenyamanan dan bencana yang ditangani	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
005	Gelar pasukan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah kegiatan seremonial dan perlombaan yang diikuti	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100 %	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100 %
007	Pengendalian Data Dan Informasi Tibum Tranmas dan Linmas	Persentase data Tibum, Gakda, dan Linmas yang dikirim	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)/ kegiatan (<i>ouput</i>)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah buku Satpol dalam angka	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
009	Pengamanan dan pengendalian trantibum	Persentase pengaduan masyarakat terhadap pelayanan trantibum	100 %	100 %	100 %	93 %	93 %	100 %	100 %	100 %
010	Pengamanan obyek vital dan kegiatan penting pemerintah	Persentase pengamanan objek vital dan kegiatan penting pemerintah	100 %	84,94 %	100 %	93 %	93 %	100 %	100 %	100 %
		Persentase unjuk rasa yang diamankan	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1.05 1.1.05.01 19	Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah	Jumlah Peraturan Perundang-undangan Daerah yang ditegakkan	30	27	28	28	100 %	29	29	100 %
001	Penertiban dan penindakan	Cakupan penegakan pelanggaran peraturan daerah	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
004	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap peraturan daerah	Jumlah sosialisasi aturan perda	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	6 Kegiatan	100 %	6 Kegiatan	12 Kegiatan	100 %
007	Penyelidikan, penyidikan, dan persidangan pelanggaran PERDA	Jumlah penyelesaian pelanggaran perda	60 Kegiatan	60 Kegiatan	60 Kegiatan	60 Kegiatan	100 %	60 Kegiatan	60 Kegiatan	100 %
		Jumlah sidang ditempat	12 Kegiatan	9 kegiatan	9 Kegiatan	9 Kegiatan	100 %	12 Kegiatan	12 Kegiatan	100 %
008	Pembinaan PPNS daerah	Jumlah PPNS yang mengikuti pembinaan	120 Orang	60 orang	90 Orang	90 Orang	100 %	120 Orang	120 Orang	100 %
009	Pengelolaan pengaduan dan gangguan ketentraman ketertiban masyarakat	Persentase pengaduan masyarakat yang tertangani dan terselesaikan	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
010	Peningkatan kewaspadaan dini	Jumlah objek rawan gangguan trantibum pelanggaran perda yang teridentifikasi	32 Jenis	28 jenis	28 Jenis	31 jenis	100 %	31 Jenis	31 Jenis	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)/ kegiatan (<i>ouput</i>)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.05 1.1.05.01 20	Program Pengembangan Potensi dan Pemberdayaan Satlinmas	Jumlah Linmas yang difasilitasi dan diberdayakan	4.608 orang	4.035 orang	3.876 orang	4.221 orang	109 %	4.242 orang	4.242 orang	100 %
011	Pengerahan dan peningkatan kewaspadaan linmas terhadap gangguan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah kegiatan yang melibatkan anggota linmas	50 kegiatan	49 kegiatan	49 kegiatan	49 kegiatan	100 %	49 kegiatan	49 kegiatan	100 %
012	Fasilitasi, Pembinaan dan Peningkatan SDM Linmas	Persentase kegiatan provinsi/pusat yang diikuti	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Persentase anggota Satlinmas yang diberi pendidikan dan pelatihan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Persentase anggota Satlinmas yang diberi sarana pakaian	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1.05 1.1.05.01 30	Program Peningkatan Ketertiban dan Ketentraman Lingkungan	Persentase Rukun Tetangga (RT) yang memiliki petugas Linmas	93 %	89 %	90 %	90 %	100 %	92 %	92 %	100 %
001	Data base dan aplikasi linmas	Jumlah Koordinasi Linmas wilayah yang dilaksanakan	4 kali	-	4 kali	4 kali	100 %	4 kali	4 kali	100 %
002	Monitoring dan evaluasi administrasi system keamanan lingkungan	Jumlah siskamling yang aktif dalam menjaga keamanan lingkungan	5684 siskamling	5633 siskamling	5664 siskamling	5664 siskamling	100 %	5674 siskamling	5674 siskamling	100 %
		Jumlah monev pos kamling	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	100 %	2 kegiatan	2 kegiatan	100 %

2.1 Analisis Kinerja Pelayanan Satpol PP Kota Semarang

Secara geografis Kota Semarang memiliki luas wilayah 373,70 KM² yang merupakan 1,15% dari total luas dataran Provinsi Jawa Tengah. Kota Semarang terbagi menjadi dua daerah yaitu daerah dataran rendah dan perbukitan. Dataran rendah memiliki ketinggian 0,75-3,5 meter di atas permukaan laut sedangkan di daerah perbukitan mempunyai ketinggian 90-359 meter di atas permukaan laut. Secara demografi sampai dengan tahun 2021 Kota Semarang memiliki penduduk bertempat tinggal tetap sebanyak 1,6 juta jiwa. Jumlah penduduk tersebut belum termasuk penduduk yang tinggal tidak tetap yang telah berbaur di tengah-tengah masyarakat. Komposisi penduduk tersebut terdiri dari keberagaman suku, agama, ras dan golongan (SARA). Secara suku sebagian besar Kota Semarang dihuni oleh suku Jawa, kemudian disusul Cina, sebagian Sunda, Madura, Batak, Minang, Bugis, Dayak, Maluku, Papua dan suku dari Timor Leste yang memilih menjadi WNI. Secara agama penduduk Kota Semarang sebagian besar beragama Islam kemudian secara berurutan Katholik, Kristen, Budha, Hindu dan Konghucu.

Keberagaman geografi dan demografi yang dimiliki Kota Semarang berpotensi menimbulkan konflik sosial yang berlatar belakang suku, agama, ras dan golongan (SARA) serta kondisi geografis yang berpotensi menimbulkan bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Oleh karena itu perlu dikelola sedemikian rupa sehingga tercipta stabilitas wilayah guna menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta iklim investasi daerah.

Seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat yang dinamis dan semakin kompleks dibutuhkan penanganan intensif dari pemerintah. Penyelenggaraan Urusan Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat berperan dalam mempengaruhi perilaku dan karakteristik bangsa agar arah berkembang sesuai dengan arah dan tujuan negara dan mampu menjawab permasalahan masyarakat.

Perkembangan ekonomi mikro melalui tingkat penyebaran tempat usaha di Kota Semarang relatif berkembang cukup pesat dari tahun ke tahun. Salah satu indikator pertumbuhan ini dapat dilihat dari tingkat kepatuhan dan kesadaran pelaku usaha atau wajib pajak/wajib retribusi dalam mentaati kebijakan/regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Semarang melalui penetapan Peraturan Daerah dalam mendukung peningkatan iklim usaha.

Kondisi tersebut diatas sangat memungkinkan timbulnya gangguan Ketentraman dan Ketertiban, terjadinya pelanggaran Perda serta unjuk rasa yang merupakan tugas Satpol PP dalam penanganannya. Dalam menyelenggarakan fungsi dan tugas pokok untuk mewujudkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

serta Penegakan Peraturan Daerah di Kota Semarang, Satuan Polisi Pamong Praja diharapkan semakin berperan aktif dan profesional dalam melaksanakan tugas dengan selalu tampil terdepan sebagai motivator. disamping itu, fungsi perlindungan masyarakat saat ini juga menjadi bagian dari tugas Satpol PP dalam penyelenggaraannya. Pemberdayaan Satlinmas merupakan ujung tombak pelaksanaan perlindungan masyarakat, pengamanan, serta terciptanya ketentraman dan ketertiban dan penanganan bencana di Kota Semarang.

Tolok ukur kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang sebagai penegak perda dan penyelenggara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, Satpol PP menitikberatkan pada penegakan produk-produk hukum serta peningkatan peran serta masyarakat dalam mematuhi peraturan dan upaya peningkatan kenyamanan dan keamanan lingkungan. Hal itu berusaha diwujudkan dengan upaya meningkatkan kemampuan sistem atau sarana dan prasarana, kelembagaan, personil, dan keuangan untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan pelayanan dasar atau tugas pokok fungsi (tupoksi) secara efektif dan efisiensi dengan menggunakan prinsip-prinsip tata kelola Pemerintah yang baik (*good governance*).

Adapun indikator kinerja yang digunakan dalam capaian kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang dapat dilihat pada tabel sbb :

**Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Semarang**

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian				Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Persentase penurunan gangguan keamanan dan ketertiban	V	V	41,4	43	44,8	46,9	48	41,4	47,2	44,17	46,9	48	Merupakan indikator yang menandai keberhasilan terwujudnya kondusivitas wilayah melalui peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat yang meliputi penurunan angka kriminalitas dan gangguan trantibum
2.	Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	V	V	5	10	15	20	25	5	10,1	14,2	20	25	Merupakan indikator yang menandai meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum dilihat dari angka gangguan keamanan dan ketertiban umum yang meliputi penurunan pelanggaran peraturan yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum seperti parkir, PKL, limbah dan kebersihan
3.	Cakupan pemberdayaan Pelindungan Masyarakat	-	V	73	74	75	77	79	71	71	71	80	79	Merupakan indikator yang menandai meningkatnya Perlindungan Masyarakat dilihat dari partisipasi anggota Satlinmas dan jumlah siskamling yang aktif di wilayah

2.2 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang

1. Peningkatan kinerja pelayanan dasar kepada masyarakat

Penyelenggaraan pembangunan dan pencapaian hasil-hasil pembangunan tidak akan dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat jika situasi keamanan dan ketentraman tidak terwujud. Oleh karena itu, keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan prasyarat utama bagi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Penurunan angka kriminalitas dan gangguan ketentraman ketertiban umum menjadi mutlak dibutuhkan jika ingin proses-proses pembangunan berjalan lancar dan kesejahteraan masyarakat tercapai.

Kebijakan pelaksanaan penegakan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat diarahkan untuk mewujudkan kondisi daerah yang aman, tentram dan tertib untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kegiatan masyarakat yang kondusif dalam rangka mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam mentaati peraturan perundang-undangan.

Sesuai tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang sebagai penegak perda dan penyelenggara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang menitikberatkan pada penegakan produk-produk hukum serta peningkatan peran serta masyarakat dalam mematuhi peraturan dan upaya peningkatan kenyamanan dan keamanan lingkungan.

Pada era keterbukaan informasi seperti sekarang ini, masyarakat dapat secara langsung memantau dan menginformasikan adanya gangguan ketentraman ketertiban umum, hal tersebut merupakan wujud peningkatan kesadaran masyarakat yang perlu ditindaklanjuti dengan upaya penyelesaian. Disamping itu penanaman pemahaman dan pengetahuan mengenai aturan terhadap masyarakat perlu ditingkatkan sejalan dengan kondisi perkotaan dan aturan yang dinamis.

Disamping itu ketentraman dan ketertiban umum merupakan salah satu pelayanan dasar pada bidang Pemerintahan Dalam Negeri dimana pelayanan tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dalam menjamin pemenuhan kebutuhan dasar Layanan Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang berhak diperoleh setiap warga negara Indonesia yang terkena dampak penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

2. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban

Upaya mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat menjadi prasyarat bagi terselenggaranya tata kehidupan masyarakat, aktivitas sosial ekonomi dan pembangunan daerah. Pada masa yang akan datang upaya meningkatkan ketertiban dan ketentraman masyarakat masih menjadi persoalan seperti kriminalitas atau gangguan trantibmas. Untuk itu perlu ditingkatkan peran masyarakat dalam upaya pencegahan dan penjagaan keamanan lingkungan termasuk pemberdayaan terhadap anggota masyarakat yang menjadi linmas dan juga Kader Siaga Trantib (KST).

3. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD

Adapun beberapa permasalahan dan hambatan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya antara lain:

- ⦿ Belum optimalnya koordinasi dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.
- ⦿ Pelaksanaan penyelenggaraan keamanan dan kenyamanan lingkungan yang dilaksanakan oleh petugas Linmas belum didukung oleh pemenuhan sarana kelengkapan bertugas yang memadai.
- ⦿ Pada tahun 2020 terdampak pandemi COVID 19 yang mengakibatkan reffocusing anggaran, dan anggaran difokuskan pada kegiatan yang berkaitan dengan COVID-19.

4. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang

Visi Walikota dan Wakil Walikota Semarang adalah “Semarang Kota Perdagangan dan Jasa Menuju Masyarakat Semakin Sejahtera”.

Kota Perdagangan dan Jasa mengandung arti bahwa Kota Semarang akan menjadi Kota Perdagangan dan Jasa yang Hebat, yang didukung oleh kondisi perkotaan yang kondusif dan modern dengan tetap memperhatikan lingkungan berkelanjutan demi kemajuan Kota Semarang. Semarang yang Hebat dalam perdagangan dan jasa dapat terlihat antara lain melalui laju pertumbuhan ekonomi yang tiap tahun terus meningkat, kontribusi kategori-kategori yang terkait dengan perdagangan dan jasa terhadap PDRB dan kontribusi kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB yang semakin meningkat, nilai investasi yang semakin besar, serta persentase kawasan banjir dan rob yang semakin menurun.

Meningkatnya nilai investasi berkaitan erat dengan kondisi keamanan dan ketentraman wilayah. Kondisi keamanan yang terpelihara mampu menarik minat investor untuk menginvestasikan sumber daya yang dimiliki ke Kota Semarang. Hal ini berdampak langsung pada pembangunan Kota Semarang secara keseluruhan dan pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan warga Kota Semarang dengan terbukanya peluang di dunia kerja serta terpenuhinya sumber-sumber kebutuhan.

5. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang menghadapi tantangan antara lain :

- a) Menurunkan angka gangguan trantibum;
- b) Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memahami, taat dan patuh terhadap aturan yang berlaku agar bisa menjadi satu kekuatan sosial masyarakat yang bermanfaat bagi pemerintah daerah;

Sedangkan peluang yang dimiliki antara lain :

- a) Kerjasama dan kemitraan yang dijalin dengan instansi terkait penegakan hukum untuk menjamin kapstian hukum dan iklim yang kondusif di Kota Semarang;
- b) Sumber daya yang memadai termasuk dukungan SDM dari petugas Linmas;

6. Formulasi isu-isu penting (rekomenadasi dan catatan strategis) yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2022 :

- a) Angka gangguan trantibum di Kota Semarang walaupun mengalami penurunan akan tetapi angkanya relatif tinggi. Sehingga membutuhkan adanya upaya-upaya dalam pencegahan secara preventif persuasive dan juga penanganan dengan penerapan sanksi tegas namun tetap mengedepankan humanisme.
- b) Berdasarkan asas keadilan maka hasil-hasil pembangunan harus dapat dirasakan oleh semua golongan masyarakat. Ada satu sistem yang menjamin hal itu, yaitu PPRG (Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender). Melalui PPRG, diharapkan semua golongan masyarakat (perempuan, anak, difabel, dan lansia) dapat mendapatkan akses yang sama terhadap hasil-hasil pembangunan. Oleh karena itu, ke depannya kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang diharapkan mampu menjangkau semua golongan masyarakat, tanpa terkecuali.

2.3 Review terhadap Rancangan Awal Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang

Sesuai tahapan RKPD tahun 2022, tahun 2022 merupakan tahun kelima periodisasi RPJMD V (Tahun 2021-2026). RKPD tahun 2022 dilaksanakan dengan tema “Pemantapan Semarang Sehat, Cerdas, Melayani, Tangguh dan Berdaya Saing”. Dengan Prioritas sebagai berikut :

- Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia
- Penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial
- Pembangunan infrastruktur kota yang tangguh, produktif dan berkelanjutan
- Penguatan daya saing ekonomi daerah
- Peningkatan tata kelola pemerintahan

Dari prioritas tersebut, telah ditetapkan rumusan sasaran dan target yang harus dicapai pada urusan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yaitu meningkatnya kualitas ketentraman dan ketertiban masyarakat dengan indikator sasaran target menurunkan jumlah angka gangguan ketentraman dan ketertiban umum menjadi 46,8 persen. Sedangkan rumusan prioritas pembangunan daerah yang terkait dengan urusan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yaitu pada prioritas peningkatan tata kelola pemerintahan dengan rumusan peningkatan kualitas ketentraman dan ketertiban masyarakat dan fokus pada peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan fasilitasi perlindungan masyarakat dan ketertiban wilayah.

RKPD juga disusun dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Rencana Kerja SKPD. Sesuai amanat tersebut maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2021 ini menyusun Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang tahun 2022.

Dokumen Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang tahun 2022, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang tahun 2022 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah. Dalam Renja dijabarkan potret dan rencana kegiatan pembangunan, yang memuat Nilai strategis, Proyeksi Anggaran, dan indikasi program kegiatan yang akan dilaksanakan selama satu tahun disertai dengan indikator kinerja.

Pemecahan berbagai permasalahan perencanaan pembangunan dimaksudkan dilakukan secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD Kota Semarang, diklasifikasikan ke dalam program-program kegiatan

pembangunan dengan mengutamakan kewenangan, Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang sesuai dengan prioritas dan kebutuhan.

Rancangan awal Tahun 2022 disusun berdasarkan RKPD Kota Semarang diarahkan pada pemenuhan pelayanan dasar masyarakat dengan mengedepankan upaya persuasif melalui peningkatan kesadaran masyarakat serta pencegahan terjadinya pelanggaran peraturan dengan mempersiapkan SDM yang profesional selaras dengan pemberlakuan Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu pelayanan dasar adalah ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat.

Rancangan awal rencana kerja yang telah disusun memuat keseluruhan pelayanan dasar dimaksud dan dijabarkan menjadi 2 Program dan 10 Kegiatan serta 47 Sub Kegiatan, sebagai berikut :

Tabel T-C.31.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022

Kota Semarang

Nama Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang

	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Semarang	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100%	23.945.469.047,-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Semarang	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100%	23.945.469.047,-	-
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	184.144.350,-	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	184.144.350,-	-
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah dokumen RENJA yang disusun	1 Dokumen	34.949.000,-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah dokumen RENJA yang disusun	1 Dokumen	34.949.000,-	-
		Kota Semarang	Jumlah dokumen RENSTRA yang disusun	1 Dokumen			Kota Semarang	Jumlah dokumen RENSTRA yang disusun	1 Dokumen		-
b	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Kota Semarang	Jumlah dokumen RKA yang disusun	1 Dokumen	19.627.710,-	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah dokumen RKA yang disusun	1 Dokumen	19.627.710,-	-
c	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah dokumen perubahan RKA yang disusun	1 Dokumen	20.000.000,-	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah dokumen perubahan RKA yang disusun	1 Dokumen	20.000.000,-	-

d	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah dokumen DPA yang disusun	1 Dokumen	10.000.000,-	Koordinasi Dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah dokumen DPA yang disusun	1 Dokumen	10.000.000,-	-
e	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah dokumen perubahan DPA yang disusun	1 Dokumen	10.000.000,-	Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah dokumen perubahan DPA yang disusun	1 Dokumen	10.000.000,-	-
f	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Kinerja SKPD	Kota Semarang	Jumlah dokumen LKJIP yang disusun	1 Dokumen	89.567.640,-	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Kinerja SKPD	Kota Semarang	Jumlah dokumen LKJIP yang disusun	1 Dokumen	89.567.640,-	-
			Jumlah dokumen LKPJ yang disusun	1 Dokumen				Jumlah dokumen LKPJ yang disusun	1 Dokumen		-
			Jumlah dokumen LPPD yang disusun	1 Dokumen				Jumlah dokumen LPPD yang disusun	1 Dokumen		-
			Pengelolaan Webiste dan Data	100%				Pengelolaan Webiste dan Data	100%		-
			Presentase pengendalian data Trantibum, Gakda dan Linmas	100%				Presentase pengendalian data Trantibum, Gakda dan Linmas	100%		-
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	20.342.409.090,-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	20.342.409.090,-	
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Pembayaran Gaji ASN dan Tunjangan ASN	12 Bulan	20.098.467.000,-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Pembayaran Gaji ASN dan Tunjangan ASN	12 Bulan	20.098.467.000,-	-
b	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Presentase pengelolaan administrasi kegiatan dan keuangan	100%	226.144.650,-	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Presentase pengelolaan administrasi kegiatan dan keuangan	100%	226.144.650,-	-
c	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1 Dokumen	4.680.000,-	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1 Dokumen	4.680.000,-	-

d	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran disusun	2 Dokumen	9.218.720,-	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran disusun	2 Dokumen	9.218.720,-	-
e	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun	1 Dokumen	3.898.720,-	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun	1 Dokumen	3.898.720,-	-
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Semarang	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	464.400.000,-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Semarang	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	464.400.000,-	-
a	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah sosialisasi tentang aturan cukai	14 Kegiatan	450.000.000,-	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah sosialisasi tentang aturan cukai	14 Kegiatan	450.000.000,-	-
b	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Presentase peserta yang lulus pendidikan/pelatihan/bimtek	100%	14.400.000,-	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Presentase peserta yang lulus pendidikan/pelatihan/bimtek	100%	14.400.000,-	-
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	835.102.944,-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	835.102.944,-	-
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah alat listrik dan penerangan kantor yang disediakan	100%	26.932.028,-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah alat listrik dan penerangan kantor yang disediakan	100%	26.932.028,-	-
b	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	100%	23.995.812,-	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	100%	23.995.812,-	-
c	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	100%	35.697.760,-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	100%	35.697.760,-	-
d	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Semarang	Penyedia barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	100%	26.463.069,-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Semarang	Penyedia barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	100%	26.463.069,-	-
e	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Pemenuhan fasilitasi tamu	100%	106.500.000,-	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Pemenuhan fasilitasi tamu	100%	106.500.000,-	-

f	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Presentase perjalanan dinas luar daerah	100%	349.667.903,-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Presentase perjalanan dinas luar daerah	100%	349.667.903,-	-
			Presentase perjalanan dinas dalam daerah	100%				Presentase perjalanan dinas dalam daerah	100%		
g	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik SKPD	Kota Semarang	Pemenuhan dukungan pelaksanaan SPBE	100%	265.846.372,-	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik SKPD	Kota Semarang	Pemenuhan dukungan pelaksanaan SPBE	100%	265.846.372,-	
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	204.145.789,-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	493.670.016	-
a	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Terlaksananya pengadaan Sound System	2 unit	204.145.789,-	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Terlaksananya pengadaan Sound System	2 unit	204.145.789,-	-
			Terlaksananya pengadaan AC	2 unit				Terlaksananya pengadaan AC	2 unit		-
			Terlaksananya pengadaan Meja dan Kursi Kerja	10 unit				Terlaksananya pengadaan Meja dan Kursi Kerja	10 unit		-
			Terlaksananya pengadaan Almari arsip	4 unit				Terlaksananya pengadaan Almari arsip	4 unit		-
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	643.000.554,-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	643.000.554,-	-
a	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Kota Semarang	Rekening jasa listrik, telekomunikasi, dan internet kantor	100%	289.000.554,-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Kota Semarang	Rekening jasa listrik, telekomunikasi, dan internet kantor	100%	289.000.554,-	-
b	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Gedung/ruang/lokasi yang dijaga kebersihannya	100%	354.000.000,-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Gedung/ruang/lokasi yang dijaga kebersihannya	100%	354.000.000,-	-

7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	1.272.266.320,-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	1.272.266.320,-	-
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Presentase kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	100%	36.318.180,-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Presentase kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	100%	36.318.180,-	-
b	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Kota Semarang	Presentase kendaraan dinas/opersional yang dipelihara	100%	951.363.390,-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Kota Semarang	Presentase kendaraan dinas/opersional yang dipelihara	100%	951.363.390,-	-
c	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Presentase peralatan gedung kantor yang dipelihara	100%	59.986.550,-	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Presentase peralatan gedung kantor yang dipelihara	100%	59.986.550,-	-
d	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Presentase peralatan gedung kantor yang dipelihara	100%	211.508.600,-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Presentase peralatan gedung kantor yang dipelihara	100%	211.508.600,-	-
e	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Presentase perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	100%	13.089.600,-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Presentase perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	100%	13.089.600,-	-
B	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kota Semarang	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100%	9.820.934.673,-	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kota Semarang	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100%	9.820.934.673,-	-

1	Penanganan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Kota Semarang	Penanganan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	100%	9.100.550.913,-	Penanganan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Kota Semarang	Penanganan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	100%	9.100.550.913,-	-
a	Pencegahan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini, Pembinaan Dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan Dan Pengawasan	Kota Semarang	Jumlah objek rawan gangguan trantibum pelanggaran perda yang teridentifikasi	31 Objek	75.000.000,-	Pencegahan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini, Pembinaan Dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan Dan Pengawasan	Kota Semarang	Jumlah objek rawan gangguan trantibum pelanggaran perda yang teridentifikasi	31 Objek	75.000.000,-	-
			Jumlah patroli siaga ketertiban dan ketenteraman masyarakat di jalan protokol dan objek wisata	11520 kali				Jumlah patroli siaga ketertiban dan ketenteraman masyarakat di jalan protokol dan objek wisata	11520 kali		-
			Presentase pengaduan masyarakat terhadap pelayanan trantibum	100%				Presentase pengaduan masyarakat terhadap pelayanan trantibum	100%		-
b	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda Dan Perkada Melalui Penertiban Dan Penanganan Unjuk Rasa Dan Kerusuhan Massa	Kota Semarang	Cakupan penegakan pelanggaran peraturan daerah	100%	570.492.380,-	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda Dan Perkada Melalui Penertiban Dan Penanganan Unjuk Rasa Dan Kerusuhan Massa	Kota Semarang	Cakupan penegakan pelanggaran peraturan daerah	100%	570.492.380,-	-

c	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah koordinasi linmas wilayah yang dilaksanakan	4 kegiatan	181.680.000,-	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah koordinasi linmas wilayah yang dilaksanakan	4 kegiatan	181.680.000,-	-
d	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Kota Semarang	Jumlah siskamling yang aktif dalam menjaga keamanan lingkungan	5664 siskamling	7.407.579.400,-	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Kota Semarang	Jumlah siskamling yang aktif dalam menjaga keamanan lingkungan	5664 siskamling	7.407.579.400,-	
			Presentase gangguan ketertiban kenyamanan dan bencana yang ditangani	100%				Presentase gangguan ketertiban kenyamanan dan bencana yang ditangani	100%		-
			Presentase kegiatan provinsi yang diikuti dan pembinaan SDM yang dilaksanakan	100%				Presentase kegiatan provinsi yang diikuti dan pembinaan SDM yang dilaksanakan	100%		
			Presentase kejadian bencana dan gangguan kemanan dan kenyamanan yang dilaporkan dibandingkan yang ditindaklanjuti pertahun	100%				Presentase kejadian bencana dan gangguan kemanan dan kenyamanan yang dilaporkan dibandingkan yang ditindaklanjuti pertahun	100%		-
e	Peningkatan Kapasitas Sdm Satuan Polisi Pamong Praja Dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk Dalam	Kota Semarang	Presentase peserta yang lulus pembinaan fisik	100%	423.845.850,-	Peningkatan Kapasitas Sdm Satuan Polisi Pamong Praja Dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk Dalam Pelaksanaan Tugas Yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Kota Semarang	Presentase peserta yang lulus pembinaan fisik	100%	423.845.850,-	-

	Pelaksanaan Tugas Yang Bernuansa Hak Asasi Manusia		Presentase peserta yang lulus pendidikan/pelatihan/bimtek	100%				Presentase peserta yang lulus pendidikan/pelatihan/bimtek	100%		-
f	Kerjasama Antar Lembaga Dan Kemitraan Dalam Teknik Pencegahan Dan Penanganan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Kota Semarang	Jumlah kegiatan seremonial dan perlombaan yang diikuti	4 kegiatan	350.000.000,-	Peningkatan Kapasitas Sdm Satuan Polisi Pamong Praja Dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk Dalam Pelaksanaan Tugas Yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Kota Semarang	Jumlah kegiatan seremonial dan perlombaan yang diikuti	4 kegiatan	350.000.000,-	-
			Jumlah kerjasama yang dilaksanakan	3 kegiatan				Jumlah kerjasama yang dilaksanakan	3 kegiatan		-
g	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Kota Semarang	Tersusunnya dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	2 Dokumen	85.078.283,-	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Kota Semarang	Tersusunnya dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	2 Dokumen	85.078.283,-	-
h	Penyediaan Layanan Dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah Dan Perkada	Kota Semarang	Terpenuhinya jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada	100%	6.875.000,-	Penyediaan Layanan Dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah Dan Perkada	Kota Semarang	Terpenuhinya jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada	100%	6.875.000,-	-
2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupate/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Kota Semarang	Penegakan Peraturan Daerah Kabupate/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	100%	590.383.760,-	Penegakan Peraturan Daerah Kabupate/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Kota Semarang	Penegakan Peraturan Daerah Kabupate/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	100%	590.383.760,-	-
a	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati/Walikota	Kota Semarang	Jumlah sosialisasi peraturan daerah	12 kegiatan	60.000.000,-	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati/Walikota	Kota Semarang	Jumlah sosialisasi peraturan daerah	12 kegiatan	60.000.000,-	
b	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Dan Peraturan	Kota Semarang	Presentase pengamanan objek vital dan kegiatan penting pemerintah	100%	329.999.860,-	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati Walikota	Kota Semarang	Presentase pengamanan objek vital dan kegiatan penting pemerintah	100%	329.999.860,-	-

	Bupati Walikota	Kota Semarang	Presentase unjuk rasa yang diamankan	100%			Kota Semarang	Presentase unjuk rasa yang diamankan	100%		-
c	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati/Walikota	Kota Semarang	Jumlah penyelesaian pelanggaran perda	60 kasus	200.383.900,-	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati/Walikota	Kota Semarang	Jumlah penyelesaian pelanggaran perda	60 kasus	200.383.900,-	-
			Jumlah sidang ditempat	9 kegiatan				Jumlah sidang ditempat	9 kegiatan		
3	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	100%	130.000.000,-	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	100%	130.000.000,-	-
a	Pengembangan Kapasitas Dan Karier PPNS	Kota Semarang	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat PPNS	3 orang	130.000.000,-	Pengembangan Kapasitas Dan Karier PPNS	Kota Semarang	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat PPNS	3 orang	130.000.000,-	

2.1 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam konteks penyusunan perencanaan pembangunan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, terdapat lima prinsip pendekatan, yaitu :

- 1) pendekatan perencanaan teknokratik
- 2) pendekatan perencanaan politik
- 3) pendekatan perencanaan partisipatif
- 4) pendekatan perencanaan dari bawah (*bottom up*)
- 5) pendekatan perencanaan dari atas (*top down*)

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu, prioritas pembangunan Kota Semarang yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan, baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Pokok-pokok Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 akan mengacu pada Kerangka Pembangunan Rancangan Teknokratis RPJMN 2020-2024 yang sedang disusun oleh pemerintah pusat dan juga perencanaan jangka panjang yang tertuang dalam RPJPN 2005-2025.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 berpedoman pada perencanaan jangka panjang dan jangka menengahnya, sedangkan tema untuk RKP 2022 adalah **“Pemantapan Semarang Sehat, Cerdas, Melayani, Tangguh dan Berdaya Saing”** yang dijabarkan melalui lima prioritas nasional, yaitu :

1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan, yang dijabarkan menjadi lima program prioritas, yaitu :
 - a. Perlindungan sosial dan tata kelola kependudukan;
 - b. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan;
 - c. Pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
 - d. Pengentasan kemiskinan;
 - e. Pembangunan budaya, karakter, dan prestasi bangsa.
2. Konektivitas dan pemerataan, yang dijabarkan menjadi lima program prioritas, yaitu :
 - a. Perluasan infrastruktur dasar;
 - b. Penguatan infrastruktur kawasan tertinggal dan ketahanan bencana;
 - c. Peningkatan konektivitas multimoda dan antarmoda mendukung pertumbuhan ekonomi;
 - d. Peningkatan infrastruktur perkotaan;
 - e. Perluasan teknologi informasi dan komunikasi.
3. Nilai tambah ekonomi dan kesempatan kerja yang dijabarkan menjadi lima program prioritas, yaitu :
 - a. Penguatan kewirausahaan dan UMKM;
 - b. Peningkatan nilai tambah ekonomi dan investasi di sektor riil;
 - c. Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja;

- d. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat komponen dalam daerah (TKDN);
- e. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.
- 4. Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup, yang dijabarkan menjadi lima program prioritas, yaitu :
 - a. Pemenuhan kebutuhan energi melalui peningkatan EBT;
 - b. Peningkatan ketersediaan akses dan kualitas konsumsi pangan;
 - c. Peningkatan kuantitas, kualitas, dan aksesibilitas air;
 - d. Peningkatan daya dukung SDA dan daya tampung lingkungan;
 - e. Penguatan ketahanan bencana.
- 5. Stabilitas pertahanan dan keamanan, yang dijabarkan menjadi lima program prioritas, yaitu :
 - a. Penguatan kemampuan pertahanan;
 - b. Peningkatan diplomasi publik dan ekonomi;
 - c. Penguatan sistem hukum dan upaya anti korupsi;
 - d. Pencegahan dan pemberantasan narkoba serta peningkatan kamtibmas;
 - e. Penanggulangan terorisme, peningkatan keamanan siber, keamanan laut dan wilayah perbatasan.

Sedangkan pada tingkat provinsi Jawa Tengah, tahun 2022 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023. Dalam penyusunan dokumen RKPD Tahun 2022, Provinsi Jawa Tengah berpedoman pada dokumen RPJMD 2018-2023 serta mengacu pada RKP Tahun 2022 guna keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional. Visi pembangunan Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, yaitu **“Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetap Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”**.

Pembangunan Jawa Tengah tahun 2021 diarahkan pada **“Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Didukung Peningkatan Kualitas Hidup Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia”** dengan prioritas sbb :

- 1. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
- 2. Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Jawa Tengah;
- 3. Peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan;
- 4. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta perbaikan fiskal daerah.

Prioritas tersebut dijabarkan lebih rinci dalam empat fokus pembangunan, yaitu:

- 1. **Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran**
 - ☞ dengan fokus pengurangan kemiskinan pada : penyediaan basic life access untuk penduduk miskin perkotaan dan pedesaan, penguatan

sustainable livelihood, penguatan tugas dan fungsi kelembagaan penanggulangan kemiskinan/ TKPKD dengan Satgas Kemiskinan serta pelibatan seluruh pemangku kepentingan;

- ✎ Dengan fokus menurunkan angka pengangguran pada : peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, serta peningkatan perlindungan, kepatuhan, dan pengawasan tenaga kerja.

2. **Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Jawa Tengah** dengan fokus pada perbaikan kualitas dan akses penyelenggaraan pendidikan secara luas, meningkatkan upaya promotif dan preventif dengan tetap melaksanakan upaya kuratif dan rehabilitatif dalam pembangunan kesehatan, serta peningkatan akses dan kualitas perlindungan perempuan dan anak.

3. **Peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan** dengan fokus pada :

- a. meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, dan peternakan, serta kualitas produk pertanian
- b. meningkatkan produksi dan kualitas hasil perikanan;
- c. optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya hutan kayu dan non kayu;
- d. perwujudan ketahanan pangan dan daya saing pangan;
- e. peningkatan produksi dan produktivitas usaha dan industri kecil dan menengah;
- f. peningkatan eco socio tourism berbasis masyarakat (local based community) dan lingkungan hidup dengan mempertimbangkan potensi keunggulan spesifik Jawa Tengah melalui pengembangan desa eco wisata dan pengembangan Daya Tarik Wisata untuk mendukung koridor pariwisata Jawa Tengah;
- g. perbaikan iklim dan kepastian investasi yang semakin kondusif;
- h. peningkatan aksesibilitas dan keselamatan distribusi barang, jasa dan penumpang serta konektivitas antar daerah dan wilayah pengembangan;
- i. peningkatan kualitas lingkungan;
- j. peningkatan ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana.

4. **Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta perbaikan kapasitas fiskal daerah** dengan fokus :

- a. Peningkatan pelayanan publik langsung kepada masyarakat (direct services);
- b. Peningkatan pemanfaatan dan perkembangan teknologi informasi dalam birokrasi (digitalisasi tata kelola pemerintahan);

- c. Peningkatan manajemen pemerintahan yang bersih dan akuntabel;
- d. Perwujudan sistem manajemen sumber daya aparatur yang baik dan efisiensi kelembagaannya;
- e. Peningkatan edukasi tentang keberagaman, toleransi, spiritualisme, dan kewarganegaran kepada seluruh lapisan masyarakat sejak usia dini untuk mengurangi konflik bernuansa SARA;
- f. **Peningkatan penanganan dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta pencegahan tindak kriminal.**

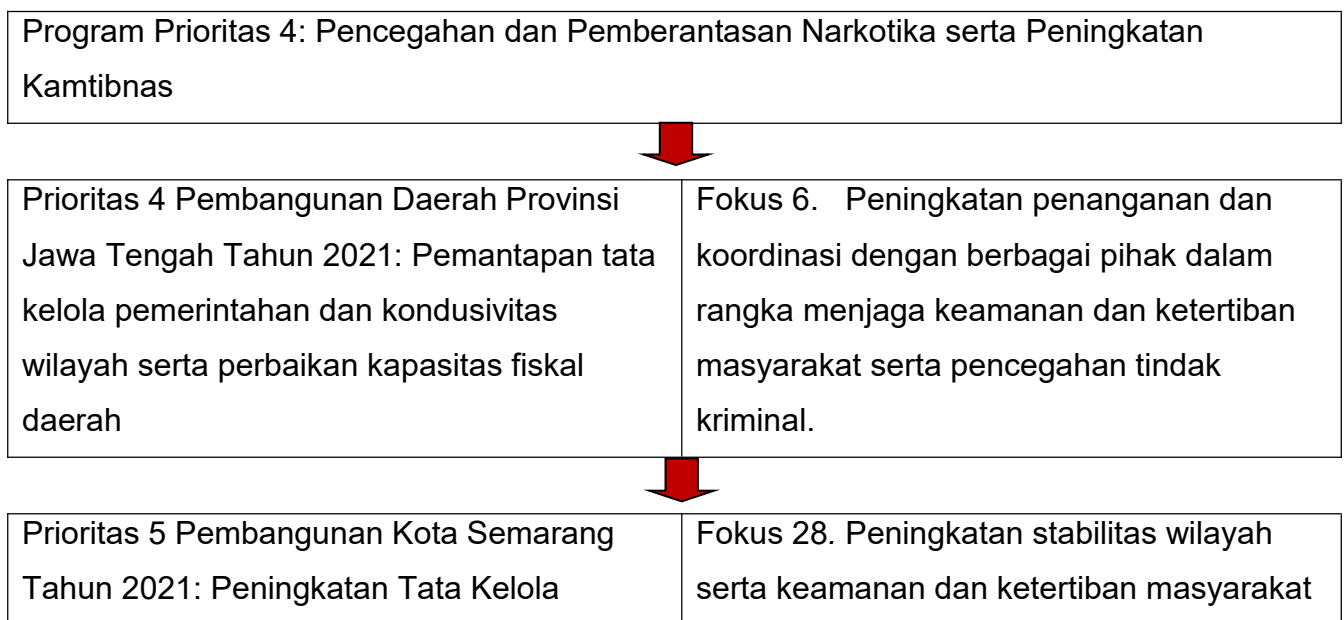
Dengan memperhatikan isu strategis dan mempertimbangkan arah pembangunan Kota Semarang yang tercantum dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026, prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 serta prioritas pembangunan nasional maka rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2022 adalah **“Pemantapan Semarang Sehat, Cerdas, Melayani, Tangguh, dan Berdaya Saing”** yang dijabarkan ke dalam lima prioritas daerah, yaitu:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang dijabarkan dalam lima fokus :
 - a. Peningkatan kualitas pendidikan guru jenjang PAUD;
 - b. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan;
 - c. Penurunan angka pengangguran;
 - d. Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan tingkat pertama dan rujukan;
 - e. Peningkatan upaya promotif dan preventif.
2. Penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial, yang dijabarkan dalam lima fokus :
 - a. Peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan bagi warga miskin;
 - b. Perlindungan PMKS;
 - c. Peningkatan sarana dan prasarana rehabilitasi sosial;
 - d. Pengembangan dan penguatan kampung tematik;
 - e. Pengembangan dan penguatan kelembagaan masyarakat miskin.
3. Pembangunan infrastruktur kota yang tangguh, produktif, dan berkelanjutan, yang dijabarkan dalam sebelas fokus :
 - a. Pembangunan sarana dan prasarana strategis perkotaan;
 - b. Peningkatan lahan pemakaman;
 - c. Peningkatan jalan dan pembangunan jalan baru;
 - d. Peningkatan ketersediaan dokumen perencanaan tata ruang;
 - e. Peningkatan penggunaan transportasi publik;
 - f. Penurunan luasan kawasan kumuh;
 - g. Peningkatan kualitas lingkungan permukiman;

- h. Peningkatan sarana dan prasarana pengendalian banjir;
 - i. Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
 - j. Pengembangan kawasan strategis;
 - k. Pengembangan fungsi ruang terbuka.
4. Penguatan daya saing ekonomi daerah, yang dijabarkan dalam lima fokus :
- a. Pembangunan sarana prasarana perdagangan;
 - b. Peningkatan produktivitas pangan;
 - c. Peningkatan jumlah investor dan nilai investasi;
 - d. Peningkatan produktivitas usaha mikro kecil;
 - e. Peningkatan kunjungan wisatawan.
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan, yang dijabarkan dalam empat fokus :
- a. Peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan;
 - b. **Peningkatan stabilitas wilayah serta keamanan dan ketertiban masyarakat;**
 - c. Peningkatan pendapatan asli daerah;
 - d. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan.

Program dan kegiatan yang disusun oleh Organisasi Perangkat Daerah harus mendukung pencapaian prioritas-prioritas tersebut, baik prioritas pembangunan nasional maupun prioritas pembangunan daerah. Keterkaitan prioritas tersebut dengan visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang dapat dilihat pada tabel sbb :

Tabel 3.1
Keterkaitan Program dan Kegiatan
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang
dengan Prioritas Pembangunan Nasional maupun Daerah



Pemerintahan	
--------------	--

3.2. Tujuan dan sasaran renja SKPD

Adapun tujuan disusunnya renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang tahun 2022.
2. Merupakan acuan pelaksanaan kinerja tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang tahun 2022 dalam mendukung prioritas pembangunan yang tercantum dalam RKPD Kota Semarang.

Sedangkan sasaran dan penyusunan rencana Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang di tahun 2022 adalah :

- a. Terciptanya kondisi aman dan tertib di Kota Semarang dalam mendukung kelancaran pembangunan daerah;
- b. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman masyarakat, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta penegakan peraturan daerah;
- c. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam menjaga ketentraman masyarakat, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta penegakan peraturan daerah;
- d. Meningkatnya penggunaan teknologi dalam menunjang penyelenggaraan tugas memelihara ketentraman masyarakat, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta penegakan peraturan daerah;
- e. Meningkatkan koordinasi *dan sinergi dalam menjaga* ketentraman masyarakat, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta penegakan peraturan daerah;
- f. Meningkatnya sarana prasarana dalam menjaga ketentraman masyarakat, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dalam menjaga ketentraman masyarakat, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta penegakan peraturan daerah.

3.3. Program dan Kegiatan

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang tahun 2021 yaitu :
 - ☉ Pencapaian visi dan misi kepala daerah;
 - ☉ Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - ☉ Peningkatan Perlindungan Masyarakat.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, yaitu sebagai berikut :

Jumlah program dan kegiatan yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2022 sebanyak 2 (dua) program dengan 10 (sepuluh) kegiatan dan 40 (empat puluh) sub kegiatan yang terdiri dari terdiri dari 28 (dua puluh delapan) kegiatan rutin dan 12 (dua belas) kegiatan pembangunan, yaitu sebagai berikut :

A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4	Koordinasi Dan Penyusunan DPA-SKPD
5	Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
6	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Kinerja SKPD
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
7	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN
8	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
9	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
10	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
11	Penyusunan Pelaporan Dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
12	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
13	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah
14	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
15	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
17	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
18	Fasilitasi Kunjungan Tamu
19	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD
20	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik SKPD
V	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
21	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya
VI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
22	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
23	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
VII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
24	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
25	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan
26	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya
27	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya
28	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya
B	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

VIII	Penanganan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota
29	Pencegahan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini, Pembinaan Dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan Dan Pengawasan
30	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda Dan Perkada Melalui Penertiban Dan Penanganan Unjuk Rasa Dan Kerusuhan Massa
31	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
32	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
33	Peningkatan Kapasitas Sdm Satuan Polisi Pamong Praja Dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk Dalam Pelaksanaan Tugas Yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
34	Kerjasama Antar Lembaga Dan Kemitraan Dalam Teknik Pencegahan Dan Penanganan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
35	Penyusunan SOP Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat
36	Penyediaan Layanan Dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah Dan Perkada
IX	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati / Walikota
37	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati/Walikota
38	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati Walikota
39	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati/Walikota
X	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota
40	Pengembangan Kapasitas Dan Karier PPNS

Rencana program dan kegiatan tersebut di atas melibatkan segenap unsur masyarakat di Kota Semarang yang terdiri dari pemangku kebijakan di Kota Semarang yang tergabung dalam Tim Yustisi Kota Semarang, jajaran instansi vertikal yang ada di Kota Semarang, dan masyarakat (Linmas/Kader Siaga Trantib/Forum Komunitas) dan para aparatur di tingkat kecamatan maupun kelurahan se-Kota Semarang.

Biaya guna menunjang pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang tahun 2022 mencapai **Rp. 33.766.403.720,- (Tiga puluh tiga milyar tujuh ratus enam puluh enam juta empat ratus tiga ribu tujuh ratus dua puluh rupiah)**. Tabel rencana program dan kegiatan yang disusun oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang Tahun 2022 adalah sebagaimana lampiran berikut ini.

Tabel T-C.33.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022

Kota Semarang

Nama Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang

Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Sumber Dana
2	3	4	5	6	7
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Semarang	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100%	23.945.469.047,-	APBD Kota Semarang
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	184.144.350,-	APBD Kota Semarang
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah dokumen RENJA yang disusun	1 Dokumen	34.949.000,-	APBD Kota Semarang
	Kota Semarang	Jumlah dokumen RENSTRA yang disusun	1 Dokumen		
Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah dokumen RKA yang disusun	1 Dokumen	19.627.710,-	APBD Kota Semarang
Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah dokumen perubahan RKA yang disusun	1 Dokumen	20.000.000,-	APBD Kota Semarang
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah dokumen DPA yang disusun	1 Dokumen	10.000.000,-	APBD Kota Semarang
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah dokumen perubahan DPA yang disusun	1 Dokumen	10.000.000,-	APBD Kota Semarang
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Kinerja SKPD	Kota Semarang	Jumlah dokumen LKJIP yang disusun	1 Dokumen	89.567.640,-	APBD Kota Semarang
		Jumlah dokumen LKPJ yang disusun	1 Dokumen		
		Jumlah dokumen LPPD yang disusun	1 Dokumen		
		Pengelolaan Webiste dan Data	100%		
		Presentase pengendalian data Trantibum, Gakda dan Linmas	100%		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	20.342.409.090,-	APBD Kota Semarang
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Pembayaran Gaji ASN dan Tunjangan ASN	12 Bulan	20.098.467.000,-	APBD Kota Semarang

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Presentase pengelolaan administrasi kegiatan dan keuangan	100%	226.144.650,-	APBD Kota Semarang
Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1 Dokumen	4.680.000,-	APBD Kota Semarang
Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran disusun	2 Dokumen	9.218.720,-	APBD Kota Semarang
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun	1 Dokumen	3.898.720,-	APBD Kota Semarang
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Semarang	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	464.400.000,-	APBD Kota Semarang
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah sosialisasi tentang aturan cukai	14 Kegiatan	450.000.000,-	APBD Kota Semarang
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Presentase peserta yang lulus pendidikan/pelatihan/bimtek	100%	14.400.000,-	APBD Kota Semarang
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	835.102.944,-	APBD Kota Semarang
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah alat listrik dan penerangan kantor yang disediakan	100%	26.932.028,-	APBD Kota Semarang
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	100%	23.995.812,-	APBD Kota Semarang
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	100%	35.697.760,-	APBD Kota Semarang
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Semarang	Penyedia barang cetak dan penggandaan yang disediakan	100%	26.463.069,-	APBD Kota Semarang
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Pemenuhan fasilitas tamu	100%	106.500.000,-	APBD Kota Semarang
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Presentase perjalanan dinas luar daerah	100%	349.667.903,-	APBD Kota Semarang
		Presentase perjalanan dinas dalam daerah	100%		
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik SKPD	Kota Semarang	Pemenuhan dukungan pelaksanaan SPBE	100%	265.846.372,-	APBD Kota Semarang
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	204.145.789,-	APBD Kota Semarang
Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Terlaksananya pengadaan Sound System	2 unit	204.145.789,-	APBD Kota Semarang
		Terlaksananya pengadaan AC	2 unit		
		Terlaksananya pengadaan Meja dan Kursi Kerja	10 unit		
		Terlaksananya pengadaan Almari arsip	4 unit		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	643.000.554,-	APBD Kota Semarang
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Kota Semarang	Rekening jasa listrik, telekomunikasi, dan internet kantor	100%	289.000.554,-	APBD Kota Semarang

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Gedung/ruang/lokasi yang dijaga kebersihannya	100%	354.000.000,-	APBD Kota Semarang
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	1.272.266.320,-	APBD Kota Semarang
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Presentase kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	100%	36.318.180,-	APBD Kota Semarang
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Kota Semarang	Presentase kendaraan dinas/opersional yang dipelihara	100%	951.363.390,-	APBD Kota Semarang
Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Presentase peralatan gedung kantor yang dipelihara	100%	59.986.550,-	APBD Kota Semarang
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Presentase peralatan gedung kantor yang dipelihara	100%	211.508.600,-	APBD Kota Semarang
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Presentase perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	100%	13.089.600,-	APBD Kota Semarang
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kota Semarang	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100%	9.820.934.673,-	APBD Kota Semarang
Penanganan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Kota Semarang	Penanganan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	100%	9.100.550.913,-	APBD Kota Semarang
Pencegahan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini, Pembinaan Dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan Dan Pengawasan	Kota Semarang	Jumlah objek rawan gangguan trantibum pelanggaran perda yang teridentifikasi	31 Objek	75.000.000,-	APBD Kota Semarang
		Jumlah patroli siaga ketertiban dan ketenteraman masyarakat di jalan protokol dan objek wisata	11520 kali		
		Presentase pengaduan masyarakat terhadap pelayanan trantibum	100%		
Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda Dan Perkada Melalui Penertiban Dan Penanganan Unjuk Rasa Dan Kerusuhan Massa	Kota Semarang	Cakupan penegakan pelanggaran peraturan daerah	100%	570.492.380,-	APBD Kota Semarang
Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah koordinasi linmas wilayah yang dilaksanakan	4 kegiatan	181.680.000,-	APBD Kota Semarang
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Kota Semarang	Jumlah siskamling yang aktif dalam menjaga keamanan lingkungan	5664 siskamling	7.407.579.400,-	APBD Kota Semarang
		Presentase gangguan ketertiban kenyamanan dan bencana yang ditangani	100%		

		Presentase kegiatan provinsi yang diikuti dan pembinaan SDM yang dilaksanakan	100%		
		Presentase kejadian bencana dan gangguan kemanan dan kenyamanan yang dilaporkan dibandingkan yang ditindaklanjuti pertahun	100%		
Peningkatan Kapasitas Sdm Satuan Polisi Pamong Praja Dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk Dalam Pelaksanaan Tugas Yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Kota Semarang	Presentase peserta yang lulus pembinaan fisik	100%	423.845.850,-	APBD Kota Semarang
		Presentase peserta yang lulus pendidikan / pelatihan / bimtek	100%		
Kerjasama Antar Lembaga Dan Kemitraan Dalam Teknik Pencegahan Dan Penanganan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Kota Semarang	Jumlah kegiatan seremonial dan perlombaan yang diikuti	4 kegiatan	350.000.000,-	APBD Kota Semarang
		Jumlah kerjasama yang dilaksanakan	3 kegiatan		
Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Kota Semarang	Tersusunnya dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	2 Dokumen	85.078.283,-	APBD Kota Semarang
Penyediaan Layanan Dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah Dan Perkada	Kota Semarang	Terpenuhinnya jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada	100%	6.875.000,-	APBD Kota Semarang
Penegakan Peraturan Daerah Kabupate/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Kota Semarang	Penegakan Peraturan Daerah Kabupate/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	100%	590.383.760,-	APBD Kota Semarang
Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati/Walikota	Kota Semarang	Jumlah sosialisasi peraturan daerah	12 kegiatan	60.000.000,-	APBD Kota Semarang
Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati Walikota	Kota Semarang	Presentase pengamanan objek vital dan kegiatan penting pemerintah	100%	329.999.860,-	APBD Kota Semarang
	Kota Semarang	Presentase unjuk rasa yang diamankan	100%		
Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati/Walikota	Kota Semarang	Jumlah penyelesaian pelanggaran perda	60 kasus	200.383.900,-	APBD Kota Semarang
		Jumlah sidang ditempat	9 kegiatan		
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	100%	130.000.000,-	APBD Kota Semarang
Pengembangan Kapasitas Dan Karier PPNS	Kota Semarang	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat PPNS	3 orang	130.000.000,-	APBD Kota Semarang

BAB IV PENUTUP

2.1 Catatan Penting

- ⦿ Dalam rangka menciptakan ketentraman dan kenyamanan lingkungan serta suasana perlindungan masyarakat dan tegaknya hukum perlu adanya partisipasi dari seluruh unsur masyarakat dan instansi terkait.
- ⦿ Koordinasi antar penegak hukum dan instansi terkait perlu ditingkatkan dan terjalin sinergi yang berkelanjutan.
- ⦿ Peningkatan sistem kerja berbasis teknologi dan komunikasi secara cepat melalui media sosial baik antar pegawai maupun dengan masyarakat.
- ⦿ Peningkatan upaya persuasif preventif untuk menekan angka pelanggaran dengan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap aturan baik Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah.

2.2 Kaidah-kaidah pelaksanaan

Dokumen Rencana Kerja Tahun 2022 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang ini memuat antara lain :

1. Penyusunan program dan kegiatan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang.
2. Keterpaduan dan sinkronisasi penyusunan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang dengan memperhatikan peran dari semua bidang yang ada dan stakeholder sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.
3. Keterpaduan dan sinkronisasi program dan kegiatan dilakukan melalui Musrenbang dan dokumen perencanaan seperti RPJMD, Renstra dan Rencana Kerja.
4. Peran masyarakat dan stakeholder dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi kebijakan, program, dan kegiatan yang telah direncanakan.
5. Penegasan Rencana Kerja Perangkat Daerah / Rencana Kerja sebagai acuan penyusunan Kebijakan Publik dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

2.3 Rencana Tindak Lanjut

Program dan kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang akan dilaksanakan secara bersinergi dan berkesinambungan dalam mendukung program-program pemerintah daerah dengan melibatkan partisipasi dan peran aktif masyarakat/stakeholder yang ada di Kota Semarang.

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA SEMARANG



FAJAR PURWOTO, SH, MM

Pemimpin Utama Muda

NIP. 19640115 199201 1 001